

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun,

Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja PD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun sebelumnya. Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan Renja PD dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

- a. Persiapan penyusunan Renja PD
- b. Penyusunan rancangan Renja PD
- c. Pelaksanaan Forum PD
- d. Penetapan Renja PD

Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah 2019 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Rancangan Renja PD dibahas pada forum PD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan

program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala PD setelah adanya pengesahan rancangan akhir renja PD oleh Kepala Daerah.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD.

Keberadaan RPJMD tahun 2016-2021 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, berkaitan dengan sistem keuangan. Pada penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 ;
 - e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
 - g. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD Kabupaten Bantul;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renja Perangkat Daerah untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kasihan Tahun 2019 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Bantul tahun 2019.
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1..Telaahan Terhadap kebijakan Nasional
- 3.2..Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan Renja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2017 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan Bupati kepada kecamatan. Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal, semua kegiatan dapat memenuhi output yang diharapkan dan mencapai target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran tercapai 95,3%. Perkiraan capaian tahun 2018 diharapkan bisa mendekati 100%.

APBD Kecamatan Kasihan untuk Tahun 2017 sebesar Rp 2.498.160.760,- ,terdiri dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 766.878.760,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.731.282.000,- Penyerapan anggaran untuk belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 731.068.934,- atau 95,3% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan karena adanya efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif. Penyerapan anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 413.710.050 dengan realisasi 385.188.953 atau 93,11 %, sedangkan penyerapan untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 353.168.710 realisasinya 345.879.981 atau 97,94 %.

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 4,7%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 6,9 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,07%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU IKM Kecamatan sebesar 15%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 0 %.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat, memiliki efisiensi

anggarannya paling besar yaitu 15 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran kualitas perencanaan pembangunan desa, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 5,7% dari anggaran target.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018				
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4)x100			
4	1											
4	1	4	1	Administrasi Pemerintahan								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan nilai AKIP	85	81	71,78	88,61	82	153,78	180,92
24	1	1	36	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	belanja ATK	12	12	12	100,00	12	24	200,00
					Jumlah langganan surat kabar, koran dan tabloid	12	12	12	100,00	12	24	200,00
					Jumlah pengadaan jasa tambah daya listrik	1	1	1	100,00	1	2	200,00
					Jumlah jasa publikasi	1	1	1	100,00	1	2	200,00
					honor petugas PPK, Barang, Kepegawaian,	12	12	12	100,00	12	24	200,00

4	1	4	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	95	89	99	111,23	90	189	198,94
24	1	2	51	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Pengadaan modal sound system	1	1	1	100,00	1	1	200,00
					Pengadaan modal TV	1	1	1	100,00	1	1	200,00
					Pengadaan modal mesin antrian	1	1	1	100,00	1	1	200,00
			52	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	2	2	2	100,00	2	4	200,00
			53	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan dinas	7	7	7	100,00	7	14	200,00
					Belanja BBM	7.900	7.900	7.900	100,00	7.900	15.800	200,00
					Belanja jasa servis	7	7	7	100,00	7	14	200,00
					Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas	4	4	4	100,00	4	8	200,00
			54	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah service peralatan Kantor	4	4	4	100,00	4	8	200,00
4	1	4	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79	75	100	133,33	76	0	0
24	1	6	17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Penyusunan laporan	1	1	1	100,00	1	0	0
4	7			Fungsi Lainnya								
4	7	4	1	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	82,6	103,25	80	162,6	203,25

24	1	35	2	Peningkatan pelayanan masyarakat	Rakor kegiatan pelayanan masyarakat	2	2	2	100,00	2	4	200,00
					Lembur pelayanan dari hari Sabtu	572	572	572	100,00	572	1.144	200,00
4	7	4	1	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Masyarakat	97	92	93	101,08	94	187	192,27
24	1	37	1	Peningkatan kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Rakor / sosialisasi peningkatan petugas sosial	2	2	2	100,00	2	4	200,00
					Jumlah petugas / pendamping soial	100	100	100	100,00	100	200	200,00
				Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Kegiatan keimanan dan ketaqwaan	2	2	2	100,00	2	4	200,00
					Peserta kegiatan keimanan dan ketaqwaan	300	300	300	100,00	300	600	200,00
				Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Rakor persiapan kegiatan fasilitasi	2	2	2	100,00	2	4	200,00
					Kegiatan fasilitas pengurusan ijin IUMK	2	2	2	100,00	2	4	200,00
					Peserta fasilitasi pengurusan ijin IUMK	100	100	100	100,00	100	200	200,00
				Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Peserta festival budaya dari Kecamatan	82	82	82	100,00	82	182,44	188,08

					Peserta festival budaya dari desa	128	128	128	100,00	128	256	200,00
				Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Peserta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	60	60	60	100,00	60	120	200,00
					Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	2	2	2	100,00	2	4	200,00
			8	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah pendampingan kegiatan lomba desa	2	2	2	100,00	2	4	200,00
					rakor persiapan lomba desa	1	1	1	100,00	1	2	200,00
			13	Bantul ekspo dan karnaval	Rakor persiapan keikutsertaan Bantul Ekspo	1	1	1	100,00	1	1	200,00
					Kegiatan Bantul Ekspo	1	1	1	100,00	1	1	200,00
				Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Peserta senam masal	1000	1000	1000	100,00	1	1	200,00
					Rakor kegiatan senam masal	2	2	2	100,00	2	4	200,00
4	1	4	1	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan	98	95	95,62	100,65	96	191,62	195,53
24	1	36	2	Monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah	Peserta rapat koordinasi	100	100	100	105,26	96	196	200,00
					Peserta pelaksanaan kegiatan fasilitasi	500	500	500	100,00	500	1.000	200,00
					Rakor, pembinaan dan fasilitasi	10	10	10	100,00	10	20	200,00

			7	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Peserta Musrenbang dan Rapat Persiapan Musrenbang	350	350	350	100,00	350	700	200,00
					Rakor persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang	4	4	4	100,00	4	8	200,00
			8	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Patroli / piket keamanan lingkungan	12	12	12	100,00	12	24	200,00
					Honor petugas (2) piket malam	12	12	12	100,00	12	24	200,00
				Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Pelaksanaan upacara 17an dan hari besar	14	14	14	100,00	14	28	200,00
					Pakaian Paskibra 80 Set	80	80	80	100,00	80	160	200,00
					Peserta Upacara	360	360	360	100,00	360	720	200,00
			9	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rakor dan kegiatan pendampingan / fasilitasi	4	4	4	100,00	4	8	200,00
					Peserta rapat dan pendampingan	120	120	120	100,00	120	240	200,00
2	7	4	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	95	95	95	100,00	95	190	200,00
				Pembinaan Organisasi Perempuan	Rapat / rakor kader PKK	90	90	90	100,00	90	180	200,00
					Peserta rapat / rakor	90	90	90	100,00	90	180	200,00
					Kader PKK Kegiatan	90	90	90	100,00	90	180	200,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Tugas pokok Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Kasihan mempunyai fungsi;

1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
6. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
7. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kasihan
Kabupaten Bantul

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		20 17	20 18	20 19	20 20	20 17	20 18	20 19	20 20	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	NSPK (norma Standar Prosedur dan Kriteria)									
1										
2										
3										
B	SPM (Standar Pelayanan Minimum)									
1										
2										
3										
C	IKK (Indikator Kinerja Kunci)									
1										
2										
3										
D	Indikator Sasaran PD sesuai Renstra PD									
1	IKM Kecamatan	80	80	85	90	82. 6	80	85	90	
2	Presentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	85	85	90	95	77	85	90	95	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	80	85	88	75	80	85	88	
4	Presentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	80	85	90	70	80	85	90	

Pada tahun 2017 Kecamatan Kasihan sudah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) namun ada beberapa pelayanan seperti ijin IUMK masih di ruang seksi Ekbang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ruang pelayanan, sarana dan prasarana (AC, mesin antrian dan komputer) serta personil pelayanan. Untuk itu sebagai langkah strategis di tahun anggaran 2018 perlu dianggarkan penambahan peralatan dan mesin perkantoran untuk menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan (IKM) dimana pada tahun 2017 nilai IKM di Kecamatan Kasihan mencapai 82,6.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum di Kecamatan Kasihan yang menjadi isu -isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat. Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan system pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan.

2. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalami dampak pada pengelolaan dana desa. Tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan

ekonomi di wilayah perdesaan, namun membuat desa kebingungan dalam pengelolaannya. Dibutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Hal ini menuntut peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

3. Terdapat sentra-sentra kegiatan Potensi Andalan Setempat (PAS) untuk mempercepat pertumbuhan, seperti Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi, (KAJIGELEM) serta Kawasan Beton, Madukismo dan Niten (KATONMANTEN).
4. Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif, mengingat letak kecamatan Kasihan yang sangat strategis di Aglomerasi perkotaan Yogyakarta dan juga termasuk kecamatan yang di lewati Ring Road Yogyakarta;
5. Tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai (UMY, UPYdll) Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja PD Kecamatan Kasihan berdasarkan rancangan awal PD Kabupaten Kasihan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kasihan.

Prioritas pembangunan di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2019 pada prinsipnya diarahkan dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan dari sisi ekonomi perdagangan dan Kerajinan. Hal ini mengingat letak geografis Kecamatan Kasihan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul termasuk kawasan pertanian, dan pengrajin usaha kecil menengah (UMKM) pengrajin sebagai potensi pengembangan ekonomi.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kasihan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kasihan	1 : Capaian Nilai AKIP	83	332,226,300	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kasihan	1 : Capaian Nilai AKIP	83	332,226,300	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah materai kantor	1000 lembar	210,152,800	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah materai kantor	1000 lembar	210,152,800	
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pembayaran listrik kantor	12 bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pembayaran listrik kantor	12 bulan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah belanja ATK	12 bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah belanja ATK	12 bulan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah peralatan listrik dan tambah daya	1 kali			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah peralatan listrik dan tambah daya	1 kali		
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pembayaran Surat Kabar, Koran Dan Tabloid	12 bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pembayaran Surat Kabar, Koran Dan Tabloid	12 bulan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah belanja publikasi	12 kali			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah belanja publikasi	12 kali		

		Kec. Kasihan	Keluaran : Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	12 bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	12 bulan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : rekening telepon	12 bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : rekening telepon	12 bulan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : cetak dan penggandaan	12 bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : cetak dan penggandaan	12 bulan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : jasa tenaga kebersihan	12 bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : jasa tenaga kebersihan	12 bulan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : honor pegawai tidak tetap	24 orang bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : honor pegawai tidak tetap	24 orang bulan		
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelayanan kantor	100 persentase			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelayanan kantor	100 persentase		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 orang/kali	122,073,500	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 orang/kali	122,073,500	
		Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200 orang/kali			Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200 orang/kali		
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah peserta Rapat	1388 Orang/ Kegiatan			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah peserta Rapat	1388 Orang/ Kegiatan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah peserta Kegiatan	2000 Orang/ Kegiatan			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah peserta Kegiatan	2000 Orang/ Kegiatan		

		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	100 persen		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Kasihan	1 : Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	269,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Kasihan	1 : Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	269,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	40 unit	80,000,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	40 unit	80,000,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	95 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	95 persen		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	4 gedung	44,000,000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	4 gedung	44,000,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pemeliharaan gedung dan bangunan	100 persentase			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pemeliharaan gedung dan bangunan	100 persentase		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah perpanjangan STNK	7 kendaraan	115,000,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah perpanjangan STNK	7 kendaraan	115,000,000	
		Kec. Kasihan	Keluaran : Bahan bakar minyak	7 kendaraan			Kec. Kasihan	Keluaran : Bahan bakar minyak	7 kendaraan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : jasa servise	7 kendaraan			Kec. Kasihan	Keluaran : jasa servise	7 kendaraan		
		Kec. Kasihan	Keluaran : pergantian suku cadang	7 kendaraan			Kec. Kasihan	Keluaran : pergantian suku cadang	7 kendaraan		

		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelayanan masyarakat	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelayanan masyarakat	100 persen		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah servise peralatan dan perlengkapan	40 kali	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah servise peralatan dan perlengkapan	40 kali	30,000,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran administrasi kantor	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran administrasi kantor	100 persen		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Kasihan	1 : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	77	5,500,000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Kasihan	1 : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	77	5,500,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	36 laporan	5,500,000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	36 laporan	5,500,000	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Kasihan	1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	70,500,000	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Kasihan	1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	70,500,000	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pelayanan pada hari sabtu	50 kali	70,500,000	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pelayanan pada hari sabtu	50 kali	70,500,000	
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pegawai lembur	8 orang bulan			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pegawai lembur	8 orang bulan		

		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelayanan masyarakat	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pelayanan masyarakat	100 persen		
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Kec. Kasihan	1 : Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	95	196,400,000	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Kec. Kasihan	1 : Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	95	196,400,000	
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah piket keamanan	365 hari	52,250,000	Pengendalian keamanan lingkungan	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah piket keamanan	365 hari	52,250,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan pengendalian kemananan lingkungan	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan pengendalian kemananan lingkungan	100 persen		
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah upacara hari besar dan 17 an	12 kali	85,250,000	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah upacara hari besar dan 17 an	12 kali	85,250,000	
		Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah seragam paskibra	80 buah			Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah seragam paskibra	80 buah		
		Kec. Kasihan	Hasil : terselenggaranya upacara hari - hari besar	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : terselenggaranya upacara hari - hari besar	100 persen		
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah monitoring PBB	2 kali	6,150,000	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah monitoring PBB	2 kali	6,150,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pembayaran PBB	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pembayaran PBB	100 persen		
	Musrenbang tingkat kecamatan	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan	1 kali	22,250,000	Musrenbang tingkat kecamatan	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan	1 kali	22,250,000	

		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan musrenbang	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan musrenbang	100 persen		
Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah		Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah laporan monografi kecamatan	1 laporan	30,500,000	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah laporan monografi kecamatan	1 laporan	30,500,000	
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pendampingan APBDes dan RAPBDes	2 kali			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pendampingan APBDes dan RAPBDes	2 kali		
		Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pendampingan administrasi Lomba desa	2 kali			Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pendampingan administrasi Lomba desa	2 kali		
		Kec. Kasihan	Hasil : Meningkatnya perencanaan pemerintahan umum	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : Meningkatnya perencanaan pemerintahan umum	100 persen		
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan		Kec. Kasihan	1 : Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	95	149,800,000	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kec. Kasihan	1 : Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	95	149,800,000	
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	120 orang	10,500,000	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	120 orang	10,500,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan penanggulangan kemiskinan	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan penanggulangan kemiskinan	100 persen		

	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah kaum rois dan karang taruna	100 orang	25,500,000	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah kaum rois dan karang taruna	100 orang	25,500,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	100 persen		
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pelatihan kewirausahaan	2 kali	9,115,000	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah pelatihan kewirausahaan	2 kali	9,115,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan pelatihan kewirausahaan	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan pelatihan kewirausahaan	100 persen		
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah rakor persiapan festival budaya	2 kali	13,010,000	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah rakor persiapan festival budaya	2 kali	13,010,000	
		Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah mengikuti festival budaya	1 kali			Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah mengikuti festival budaya	1 kali		
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran festival budaya	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran festival budaya	100 persen		
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 kali	9,100,000	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 kali	9,100,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	100 persen		

	Penyelenggaraan lomba desa	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah rapat persiapan lomba desa	3 kali	13,500,000	Penyelenggaraan lomba desa	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah rapat persiapan lomba desa	3 kali	13,500,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan lomba desa	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran kegiatan lomba desa	100 persen		
	Bantul Ekspo dan karnaval	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah kegiatan bantul ekspo	1 kali	20,075,000	Bantul Ekspo dan karnaval	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah kegiatan bantul ekspo	1 kali	20,075,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran keikutsertaan bantul ekspo	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran keikutsertaan bantul ekspo	100 persen		
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah peserta senam masal	1000 orang	49,000,000	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Kec. Kasihan	Keluaran : Jumlah peserta senam masal	1000 orang	49,000,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : meningkatnya kesehatan masyarakat	90%			Kec. Kasihan	Hasil : meningkatnya kesehatan masyarakat	95%		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Kasihan	1 : Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	86%	28,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Kasihan	1 : Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88%	28,000,000	
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah rapat koordinasi TP PKK	3 kali	28,000,000	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kec. Kasihan	Keluaran : jumlah rapat koordinasi TP PKK	3 kali	28,000,000	
		Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pembinaan organisasi perempuan	100 persen			Kec. Kasihan	Hasil : kelancaran pembinaan organisasi perempuan	100 persen		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan kebijakan Nasional dan Daerah, RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2018 menjelaskan bahwa tema pembangunan Nasional Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 adalah **“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Sedangkan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2019 adalah **“Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”**. Tema pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah **”Meningkatkan Kualitas Pembangunan Yang Lebih Berkeadilan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerataan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik, Menuju Bantul Sehat, Cerdas, Sejahtera”**.

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan tersebut mengikuti pergeseran paradigma pengelolaan pemerintah dari sentralistik ke desentralistik. Dengan adanya pergeseran menjadi momentum penting untuk melahirkan format pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap *public goods* (barang publik) secara cepat, murah, dan berkeadilan.

Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik di tingkat daerah adalah adanya pembagian kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah kecamatan dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik seperti dalam pelayanan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga/E-KTP) sudah sepenuhnya dapat dilayani di kecamatan dan penandatanganan Kepala Dinas dilakukan dengan menggunakan *scanne*. Karena itu, hampir semua bidang pelayanan adalah diselenggarakan di tingkat kecamatan. Perubahan pelayanan ini disebut pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintahan yang tidak terpuji, korup,

dan tidak bertanggungjawab. Dalam praktiknya, sering terdapat pandangan bahwa birokrasi pemerintah atau setiap berhubungan dengan birokrasi pemerintah untuk mendapatkan suatu pelayanan menunjukkan gejala yang mengecewakan, berbelit-belit, lama, tidak terbuka dan tidak memuaskan termasuk kurang koordinasi.

Fungsi pelayanan aparatur sangatlah penting mengingat kecamatan merupakan instansi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi aparatur pemerintah khususnya tingkat kecamatan untuk selalu menampakkan pelaksanaan kinerja secara optimal dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan dalam hal ini pelayanan e-KTP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pernduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, Pasal 1 Butir (1) menyebutkan bahwa, "Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 1 butir (2) menyatakan bahwa "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya di singkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia".

Dengan diterbitkannya KTP Nasional yang berbasis NIK tersebut oleh instansi pelaksana, maka setiap warga hanya akan memiliki satu KTP dengan NIK yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan bahwa, blanko KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik. Program electronic-KTP selanjutnya disingkat eKTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011.

Berdasarkan uraian diatas, pada prinsipnya kebijakan pembangunan daerah harus sejalan dan mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Kecamatan merupakan salah satu satuan kerja PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian program dan

kegiatan Kecamatan harus diarahkan untuk mengoptimalkan koordinasi di semua aspek pembangunan dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, dan integrasi pembangunan Desa-Kabupaten-Provinsi-Nasional.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kasihan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi tugas pelayanan kepada masyarakat terutama untuk pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) hal tersebut telah disepakati sebagai Visi Kecamatan Kasihan.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;

Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dalam RPJPD tahun ke 3 (2016-2021) pembangunan daerah diarahkan untuk lebih memantapkan Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.

Menjabarkan arahan dalam RPJPD tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis, maka tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di dalam menyelenggarakan organisasi kecamatan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Bantul sehat, cerdas, dan sejahtera.
2. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat se kecamatan Kasihan meliputi kependudukan, pertanahan, pembinaan desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian dan pengembangan budaya, lingkungan hidup, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan serta koordinasi pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.

Sedangkan sasaran yaitu hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu ke depan adalah :

1. Sasaran internal, diharapkan akan tercapai kualitas SDM yang memiliki kemampuan koordinasi pelaksanaan kebijakan kepala daerah, memiliki kemampuan, pendeteksian dini dan antisipatif serta memiliki kemampuan untuk memandu dan mendorong ke arah solusi dan kebijakan yang baik khususnya bidang ekonomi.
2. Hasil kinerja penyedia layanan yang memiliki kriteria dalam hal profesionalisme dan ketrampilan. Konsumen menyadari bahwa penyedia layanan memiliki sistem operasi, sumberdaya fisik, dan pekerja dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah konsumen secara profesional. Sehingga diharapkan terwujudnya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa, yang diwujudkan dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini Kecamatan juga berperan dalam pembinaan dan pendampingan

untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dalam pengawasan penggunaan ADD terkait akuntabilitas anggaran, setiap unsur yang menggunakan anggaran, harus memiliki program yang akan dicapai, serta adanya informasi yang jelas. Keterlibatan masyarakat dan pendampingan dari Kecamatan, akan menyalurkan ADD secara tepat guna dengan penyerapan yang optimal, sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan ekonomi yang dari sektor Industri Kecil Menengah (IKM), yang merupakan sektor vital untuk menciptakan pertumbuhan lapangan kerja.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Kasihan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Berikut daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2019 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
- b. Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan
- b. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
- c. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, dan kepegawaian

4. Program Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat

6. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan

- a. Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah
- b. Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan
- c. Pengendalian keamamann lingkungan
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- e. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

7. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan

- a. Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya

- b. Peningkatan keimaman dan ketaqwaan kepemudaan
- c. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- d. Fasilitasi festival seni budaya daerah
- e. Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba
- f. Penyelenggaraan Lomba desa
- g. Bantul ekspo dan karnaval
- h. Pengelolaan kesehatan masyarakat

Program, kegiatan, rencana kinerja, Indikator kinerja, lokasi sasaran kegiatan, dan kebutuhan dana indikatif dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kasihan Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan Nilai Akip	Kec. Kasihan	83	303,121,500	APBD		84	332.226.300
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Keluaran : Jumlah materai kantor Keluaran : Jumlah pembayaran listrik kantor Keluaran : Jumlah belanja ATK Keluaran : Jumlah peralatan listrik dan tambah daya Keluaran : Jumlah pembayaran Surat Kabar, Koran Dan Tabloid Keluaran : Jumlah belanja publikasi Keluaran : Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian Keluaran : rekening telepon Keluaran : cetak dan penggandaan Keluaran : peralatan kebersihan dan	Kec. Kasihan	1000 lembar 12 bulan 12 bulan 1 kali 12 bulan 12 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	209.284.575	APBD		1300 lembar 12 bulan 12 bulan 1 kali 12 bulan 12 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan	210.152.800

				bahan pembersih Keluaran : jasa tenaga kebersihan Keluaran : honor pegawai tidak tetap Hasil : kelancaran pelayanan kantor		12 bulan 24 orang bulan 100 persentase			12 bulan 24 orang bulan 100 persentase	
			Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran : jumlah perjalananan dinans luar daerah Keluaran : jumlah perjalananan dinas dalam daerah Keluaran : Jumlah peserta Rapat Keluaran : Jumlah peserta Kegiatan Hasil : kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec. Kasihan	5 orang/kali 200 orang/kali 1388 Orang/ Kegiatan 2000 Orang/ Kegiatan 100 persen	110.532.000	APBD	8 orang/kali 220 orang/kali 1388 Orang/ Kegiatan 2000 Orang/ Kegiatan 100 persen	122.073.500
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kec. Kasihan	95 persen	241.782.000	APBD	96 persen	269.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Hasil : kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec. Kasihan	40 unit 95 persen	79.432.000	APBD	40 unit 95 persen	80.000.000
			Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Keluaran : jumlah pemeliharaangedung dan bangunan Hasil : kelancaran pemeliharaan gedung dan bangunan	Kec. Kasihan	4 gedung 100 persentase	40.000.000	APBD	4 gedung 100 persentase	44.000.000

				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : jumlah perpanjangan STNK Keluaran : Bahan bakar minyak Keluaran : jasa servise Keluaran : pergantian suku cadang Hasil : kelancaran pelayanan masyarakat	Kec. Kasihan	7 kendaraan 7 kendaraan 7 kendaraan 7 kendaraan 100 persen	103.450.000	APBD		8 kendaraan 8 kendaraan 8 kendaraan 8 kendaraan 100 persen	115.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : jumlah servise peralatan dan perlengkapan Hasil : kelancaran administrasi Kantor	Kec. Kasihan	40 kali 100 persen	18.900.000	APBD		40 kali 100 persen	30.000.000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Kec. Kasihan	77	4.320.000	APBD		78	5.500.000
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan	Keluaran : Jumlah laporan capaiankinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan Hasil : tersusunnya laporan keuangan dan program	Kec. Kasihan	36 laporan 100 persen	4.320.000	APBD		36 laporan 100 persen	5,500,000
				Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kec. Kasihan	90 %	65.310.000	APBD		95%	70.500.000
				Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Keluaran : Jumlah pelayanan pada hari sabtu Keluaran : Jumlah pegawai lembur Hasil : kelancaran pelayanan Masyarakat	Kec. Kasihan	50 kali 8 orang bulan 100 persen	65.310.000	APBD		50 kali 8 orang bulan 100 persen	70.500.000

				Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Kec. Kasihan	90%	143.445.000	APBD		95%	196.400.000
				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Keluaran : jumlah piket keamanan Hasil : kelancaran kegiatan pengendalian kewananan lingkungan	Kec. Kasihan	365 kali 100 persen	23.540.000	APBD		365 kali 100 persen	52.250.000
				Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Keluaran : Jumlah upacara hari besar dan 17 an Keluaran : jumlah seragam paskibra Hasil : terselenggaranya upacara hari - hari besar	Kec. Kasihan	12 kali 80 buah 100 persen	68.650.000	APBD		12 kali 80 buah 100 persen	85.250.000
				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Keluaran : Jumlah monitoring PBB Hasil : kelancaran pembayaran PBB	Kec. Kasihan	2 kali 100 persen	4.930.000	APBD		0 kali 0 persen	6.150.000
				Musrenbang Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan Hasil : kelancaran kegiatan Musrenbang	Kec. Kasihan	1 kali 100 persen	17.675.000	APBD		1 kali 100 persen	22.250.000
				Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Daerah	Keluaran : jumlah laporan monografi kecamatan Keluaran : Jumlah pendampingan APBDes dan RAPBDes Keluaran : Jumlah pendampingan administrasi Lomba desa Hasil : Meningkatnya perencanaan pemerintahan umum	Kec. Kasihan	1 laporan 2 kali 2 kali 100 persen	28.650.000	APBD		1 laporan 2 kali 2 kali 100 persen	30.500.000

				Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Kasihan	0 persen	125.623.500	APBD		0 Persen	149.800.000
				Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Keluaran : jumlah pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya Hasil : kelancaran kegiatan penanggulangan kemiskinan	Kec. Kasihan	120 orang 100 persen	9.020.000	APBD		120 orang 100 persen	10.500.000
				Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Keluaran : jumlah kaum rois dan karang taruna Hasil : kelancaran kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Kec. Kasihan	100 orang 100 persen	21.425.000	APBD		120 orang 100 persen	25.500.000
				Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Keluaran : Jumlah pelatihan kewirausahaan Hasil : kelancaran kegiatan pelatihan kewirausahaan	Kec. Kasihan	2 kali 100 persen	5.805.000	APBD		2 kali 100 persen	9.115.000
				Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Keluaran : Jumlah rakor persiapan festival budaya Keluaran : jumlah mengikuti festival budaya Hasil : kelancaran festival budaya	Kec. Kasihan	2 kali 1 kali 100 persen	15.411.000	APBD		2 kali 1 kali 100 persen	13.010.000
				Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Keluaran : Jumlah fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Hasil : kelancaran fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kec. Kasihan	1 kali 100 persen	9.100.000	APBD		1 kali 100 persen	9.100.000

				Penyelenggaraan Lomba Desa	Keluaran : Jumlah rapat persiapan lomba desa Hasil : kelancaran kegiatan lomba desa	Kec. Kasihan	3 kali 100 persen	10.250.000	APBD		3 kali 100 persen	13.500.000
				Bantul Ekspo dan Karnaval	Keluaran : jumlah kegiatan bantul ekspo Hasil : kelancaran keikutsertaan bantul ekspo	Kec. Kasihan	1 kali 100 persen	20.462.500	APBD		1 kali 100 persen	20.075.000
				Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kegiatan senam bersama	Kec. Kasihan	1 kali	43,362,000	APBD		1 kali	47,698,200
				Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Kasihan		22.200.000	APBD			28.000.000
				Pembinaan Organisasi Perempuan	Keluaran : jumlah rapat koordinasi TP PKK Hasil : kelancaran pembinaan organisasi perempuan	Kec. Kasihan	3 kali 100 persen	22.200.000	APBD		3 kali 100 persen	28.000.000

